

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN

Sandy Candra Saputra<sup>1</sup>, I Wayan Suwendra<sup>2</sup>, Fridayana Yudiaatmaja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
e-mail:sandy.oconner@ymail.com, ycgeda@yahoo.co.id, fyudiaatmaja@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dilihat dari varian pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan pendapatan. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah ditinjau dari varian belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan kemudian dianalisis dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

**Kata kunci:** keuangan daerah, kinerja belanja, kinerja keuangan dan kinerja pendapatan

## Abstract

*This research aims to know the financial performance of Local Government at Jembrana District in managing the Regional Government Budget year 2010-2014. The financial performance in managing the local budget revenues was observed from the revenue variant, the degree of decentralization, the local financial independence and the revenue development. The financial performance in managing the local budget expenditures was reviewed from the expenditure variant, the expenditure balance, and the expenditure efficiency. The used research design was descriptive quantitative research. The data was collected using documentation and was analyzed by financial ratios. The result of this research showed that (1) the revenue variant was categorized as good (2) the ratio degree of decentralization was categorized as very low (3) the ratio of local financial independence was categorized as very low (4) the ratio of revenue development showed positive development (5) the expenditure variant was categorized as good (6) the ratio of expenditure balance showed that the expenditure realization was much more than the operational expenditure (7) the ratio of expenditure efficiency was categorized as efficient.*

**Key words:** expenditure performance, financial performance, local financial and revenue performance

## 1. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih

pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Seiring dilaksanakannya otonomi daerah yang secara resmi berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di propinsi Bali juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimilikinya. Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat dilihat dengan berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja itu sendiri merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan laporan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana realisasi PAD di Kabupaten Jembrana jika dilihat dari nilai nominalnya, jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari segi pertumbuhan realisasinya, pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Akan tetapi jika di lihat dari data di atas jumlah pendapatan dari pihak ekstern dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami kenaikan maka dapat di simpulkan penyumbang dana terbesar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam pembiayaan berbagai belanja daerah masih di dominasi oleh Pendapatan Pihak Ekstern. Kemudian untuk kinerja kemandirian daerah pada Kabupaten Jembrana dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tingkat kemandirian keuangannya masih dalam kategori rendah sekali, dimana menurut Paul Hersey dan Keneth Blancard dalam Nugroho (2003) yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" menyatakan bahwa secara konseptual pola hubungan dari kisaran tersebut termasuk ke dalam Pola Hubungan Instruktif, yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada peran pemerintah daerah, juga bisa dikatakan pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan di Kabupaten Jembrana dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah di Kabupaten Jembrana selama periode 2010 – 2014. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara teoritik penelitian ini dilandasi beberapa teori tentang keuangan daerah, APBD dan kinerja keuangan daerah. Dilihat dari arti sempit, keuangan daerah identik dengan APBD maka dari itu keuangan daerah berkaitan dengan hal-hal terkait APBD. Mamesah dalam Halim (2004: 18) menyatakan, keuangan daerah dapat diartikan sebagai: Semua hak dan

kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memeperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja dapat dilakukan dalam beberapa bagian diantaranya sebagai berikut.

#### 1. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Mahmudi (2010:135) menyatakan bahwa, analisis terhadap kinerja pendapatan antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

##### a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Varians Pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi Pendapatan-Anggaran Pendapatan} \quad (1)$$

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

##### b. Analisis Rasio Keuangan

###### (1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio Derajat Desentralisasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

###### (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (2000:150) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan daerah adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan Ekstern}} \times 100\% \quad (3)$$

Semakin tinggi hasilnya, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, yang berarti juga bahwa ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah. Paul Hersey dan Keneth Blancard dalam Nugroho (2003) yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" menyatakan bahwa secara konseptual ada beberapa pola hubungan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu: (a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, (b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, (c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah, (d) Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

### (3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\% \quad (4)$$

Jika pemerintah daerah mampu mempertahankan atau meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya maka pertumbuhannya positif, sebaliknya jika pemerintah daerah tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya maka pertumbuhannya negatif.

## 2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Mahmudi (2010:155) menyatakan bahwa, analisis anggaran belanja dilakukan dengan cara sebagai berikut.

### a. Analisis varians belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians belanja dapat dirumuskan sebagai berikut.

#### Realisasi Pendapatan - Anggaran Pendapatan

Jika realisasi belanja lebih kecil dari jumlah anggaran maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka kinerja anggaran dikatakan kurang baik.

### b. Analisis Keserasian Belanja

Menurut Widodo (2000:153) rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan (langsung) dan belanja rutin (tidak langsung) secara optimal. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

#### Rasio Belanja Modal

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (5)$$

### Rasio Belanja Operasional

$$\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (6)$$

Rasio ini menggambarkan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional atau belanja modal. Belum ada standar yang pasti mengenai besarnya rasio belanja operasional maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

#### c. Analisis Efisiensi Belanja

Menurut Widodo (2000:153) rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan (langsung) dan belanja rutin (tidak langsung) secara optimal. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (7)$$

Jika rasio efisiensinya kurang dari 100% maka pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Periode Tahun 2010-2014. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014 yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dan juga BPS Kabupaten Jembrana.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Analisis Kinerja Pendapatan

#### a. Analisis Varians Pendapatan

Tabel 1 Varians Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians/Selisih		Kinerja
			Rp	%	
2010	486.729.445.027,30	488.984.315.567,71	2.254.870.540,41	100,46	Baik
2011	559.656.551.455,97	567.460.504.309,45	7.803.952.853,48	101,39	Baik
2012	655.429.891.302,47	651.398.304.034,94	(4.031.587.267,53)	99,38	Kurang Baik
2013	740.996.448.323,99	745.334.982.511,84	4.338.534.187,85	100,59	Baik
2014	823.266.678.216,99	823.352.410.267,26	85.732.050,27	100,01	Baik

Sumber: Data yang diolah

Perhitungan varians pendapatan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014. Dilihat dari analisis varians pendapatan, pada tahun 2010 sampai 2011 realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai baik karena realisasi anggaran pendapatan yang bisa dicapai melebihi anggaran atau target yang ditetapkan. Akan tetapi di tahun 2012 dilihat dari varians anggaran pendapatan, kinerja pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai kurang baik karena pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 kinerja pendapatan pemerintah Kabupaten

Jembrana jika dilihat dari varians anggaran pendapatan dinilai baik, karena pada tahun 2013 sampai dengan 2014 pemerintah mampu mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, jika dilihat dari rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dapat mencapai 100,37% pendapatan dari anggaran yang ditetapkan.

b. Analisis Rasio Keuangan

(1) Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 2 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2010	34.380.822.968,32	488.984.315.567,71	7,03	Sangat Kurang
2011	41.330.605.674,41	567.460.504.309,45	7,28	Sangat Kurang
2012	46.470.110.900,58	651.398.304.034,94	7,13	Sangat Kurang
2013	68.485.482.416,06	745.334.982.511,84	9,19	Sangat Kurang
2014	89.349.644.542,62	823.352.410.267,26	10,85	Kurang

Sumber: Data yang diolah

Pada perhitungan rasio derajat desentralisasi dalam tabel diatas, di tahun 2010 derajat desentralisasi di Kabupaten Jembrana sebesar 7,03%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 7,28%. Akan tetapi di tahun 2012 mengalami penurunan dimana derajat desentralisasinya sebesar 7,13%. Di tahun 2013 sampai tahun 2014 derajat desentralisasi di Kabupaten Jembrana kembali mengalami peningkatan dimana jumlah derajat desentralisasinya menjadi 9,19% di tahun 2012 dan 10,85% di tahun 2014.

Berdasarkan skala interval menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM persentase derajat desentralisasi di Kabupaten Jembrana untuk tahun 2010 sampai dengan 2013 derajat desentralisasinya masih sangat kurang dan di tahun 2014 meskipun mengalami peningkatan menjadi 10,85% masih tergolong dalam kategori kurang yang artinya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih kurang bahkan sangat kurang. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kabupaten Jembrana dari tahu 2010 sampai tahu 2014 sebesar 8,30% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatn Daerah masih sangat kurang.

(b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Ekstern (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2010	34.380.822.968,32	454.603.492.599,39	7.56	Instruktif
2011	41.330.605.674,41	526.930.728.849,28	7.84	Instruktif
2012	46.470.110.900,58	604.928.193.134,36	7.68	Instruktif
2013	68.485.482.416,06	676.849.500.095,78	10.12	Instruktif
2014	89.349.644.542,62	734.002.765.724,64	12.17	Instruktif

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Jembrana di tahun 2010 jumlahnya sebesar 7,56% meningkat di tahun 2011 menjadi 7,84%. Akan tetapi di tahun 2012 mengalami penurunan tingkat kemandirian dimana jumlahnya sebesar 7,68%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2013 dan tahun 2014 yang masing-masing sebesar 10,12% dan 12,17%. Secara keseluruhan dilihat dari persentasi

kemandirian keuangan daerah pola hubungan di Kabupaten Jembrana adalah pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Semakin tinggi rasio kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, begitupula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masuk ke dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal tersebut dibuktikan dari persentase hasil perhitungan diatas meskipun sebagian besar mengalami kenaikan, namun rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan sebesar 9,07% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama terhadap bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum.

(c) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi TPD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	34.380.822.968,32	-	488.984.315.567,71	-
2011	41.330.605.674,41	20,21	567.460.504.309,45	16,05
2012	46.470.110.900,58	12,44	651.398.304.034,94	14,79
2013	68.485.482.416,06	47,38	745.334.982.511,84	14,42
2014	89.349.644.542,62	30,47	823.352.410.267,26	10,47

Sumber: Data yang diolah

Pada tabel diatas mengenai perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 pertumbuhannya positif. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2011 sebesar 20,21% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 16,05% untuk Total Pendapatan Daerah (TPD). Kemudian pertumbuhan PAD di tahun 2012 sebesar 12,44% sedangkan untuk pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 14,79%. Untuk pertumbuhan pendapatan di tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 47,38% pada PAD dan 14,42% pada TPD. Selanjutnya pertumbuhan PAD di tahun 2014 sebesar 30,47% sedangkan untuk pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 10,47%.

Meskipun dari segi persentase tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi pada PAD bahkan persentase untuk pertumbuhan TPD cenderung mengalami penurunan akan tetapi kinerja pemerintah Kabupaten Jembrana dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis Varians Belanja

Tabel 5 Varians Belanja Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians/Selisih Rp	%	Kinerja
2010	550.991.336.409,74	496.307.776.717,41	54.683.559.692,33	90,08	Baik
2011	615.427.631.688,71	546.848.475.424,76	68.579.156.263,95	88,86	Baik
2012	728.713.199.862,90	664.723.059.684,62	63.990.140.178,28	91,22	Baik
2013	797.854.892.374,96	718.538.443.529,05	79.316.448.845,91	90,06	Baik
2014	903.784.555.025,75	786.285.298.610,23	117.499.256.415,52	87,00	Baik

Sumber: Data yang diolah

Dilihat dari tabel diatas mengenai analisis varians belanja, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dinilai baik. Dimana di

tahun 2010 pemerintah daerah menggunakan 90,08% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2011 pemerintah daerah menggunakan 88,86% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2012 pemerintah daerah menggunakan 91,22% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2013 pemerintah daerah menggunakan 90,06% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 87,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Meskipun dari segi nominal jumlah realisasi belanja yang direalisasikan pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan akan tetapi jumlah tersebut masih lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerjanya tetap dinilai baik karena pemerintah daerah Kabupaten Jembrana bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak sampai melebihi anggaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan dilihat dari rata-rata persentasenya pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan 89,44% dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

#### b. Analisis Keserasian Belanja

Tabel 6 Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasional di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Operasional (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)	Rasio Belanja Operasional (%)
2010	496.307.776.717,41	111.222.572.762,37	385.108.617.156,00	22,41	77,59
2011	546.848.475.424,76	90.558.107.530,34	456.293.320.159,40	16,56	83,44
2012	664.723.059.684,62	169.836.741.749,42	494.875.741.652,90	25,55	74,45
2013	718.538.443.529,05	187.754.095.294,14	530.776.846.329,25	26,13	73,87
2014	786.285.298.610,23	207.815.204.422,68	578.459.691.006,33	26,43	73,57

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2010-2014 pemerintah Kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran belanja daerahnya untuk keperluan belanja operasional. Dimana pada tahun 2010 belanja operasional sebesar 77,59% dari total anggaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 25,55% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2011 belanja operasional sebesar 83,44% dari total anggaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 16,56% dari total anggaran belanja. Kemudian pada tahun 2012 pemerintah daerah menggunakan 74,45% dari total anggaran belanja untuk belanja operasional sedangkan untuk belanja modal digunakan 25,55% dari total anggaran belanja. Di tahun 2013 jumlah belanja operasional sebesar 73,87% dari total anggaran belanja daerah sedangkan anggaran untuk belanja modal sebesar 26,13% dari total anggaran. Kemudian untuk tahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 73,57% dari total anggaran belanja untuk belanja operasional sedangkan untuk belanja modal digunakan 26,43% dari total anggaran belanja.

Secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pemerintah daerah Kabupaten Jembrana mengalokasikan rata-rata 76,58% anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional dan sisanya yaitu rata-rata 23,42% digunakan untuk belanja modal.

#### c. Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 7 Rasio Efisiensi Belanja di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2010	550.991.336.409,74	496.307.776.717,41	90,08
2011	615.427.631.688,71	546.848.475.424,76	88,86
2012	728.713.199.862,90	664.723.059.684,62	91,22
2013	797.854.892.374,96	718.538.443.529,05	90,06

---

2014	903.784.555.025,75	786.285.298.610,23	87,00
------	--------------------	--------------------	-------

---

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Jembrana dari segi efisiensi belanja dalam waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 telah melakukan kinerja yang efisien. Dimana tahun 2010 jumlah realisasi belanja sebesar 90,08% dari jumlah keseluruhan anggaran anggaran belanja di tahun tersebut. Kemudian di tahun 2011 pemerintah Kabupaten Jembrana realisasi belanjanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 88,86% dari total keseluruhan anggaran belanja. Untuk tahun 2012 persentase efisiensi belanja naik dari tahun sebelumnya dimana realisasi anggaran di Kabupaten Jembrana di tahun 2012 sebesar 91,22% dari total keseluruhan anggaran belanja. Di tahun 2013 dan 2014 pemerintah lebih efisien dalam merealisasikan belanja daerah dimana jumlah realisasi belanjanya di tahun 2013 dan 2014 berturut-turut sebesar 90,06% dan 87,00% dari total anggaran belanja.

Jika dilihat dari nominalnya baik anggaran belanja maupun realisasi belanja dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus meningkat, namun dilihat dari rasionya secara keseluruhan tetap dibawah 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten jembrana telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

#### 4. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola pendapatan daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat diambil beberapa simpulan diantaranya (1)dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik, (2)dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, (3)dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, (4)dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya, (5)dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk dalam kategori baik, (6)dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional, (7)dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan simpulan diatas disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk (1) memaksimalkan semua sumber pendapatan baik berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah agar tetap bisa memenuhi semua kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jembrana, (2) terus memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah. Dengan lebih memaksimalkan potensi yang ada pada sektor pertanian, kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Jembrana bisa secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pihak ekstern, (3) sebaiknya pemerintah daerah tetap meningkatkan realisasi belanja dalam hal belanja modal dan mengefisienkan belanja dalam hal belanja operasional.

#### Daftar Pustaka

Agus, Nurhayati. 2008. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kota Bitung. Skripsi.Universitas Sam Ratulangi Manado.

Fahmi, Irfan. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. Cetakan kesatu. Alfabeta CV. Bandung.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Pres
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Marizka, Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Universitas Sumatra. Medan.
- Rosalina, Eka. 2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pusat dan daerah.
- Widodo.2001. Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Yuliati. 2001. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP.